

DISTORSI PASAR TENAGA KERJA : ANALISIS KEKAKUAN UPAH DAN KELAMBANAN RESPON PERMINTAAN TENAGA KERJA DI SULAWESI SELATAN

Labor Market Distortion : Analysis of Wage Rigidity and Indolence of labor demand response in South Sulawesi Province

Mahyuddin¹, Bambang Juanda² dan Hermanto Siregar³

¹⁾ Dosen Jurusan Sosek Pertanian Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin.

²⁾ Lektor Kepala Departemen Ilmu Ekonomi, FEM dan Pascasarjana IPB Bogor..

³⁾ Lektor Kepala Departemen Ilmu Ekonomi, FEM dan Pascasarjana IPB, Bogor.

Abstract

The study aimed to analyze labor market distortion based on wage rigidity level and indolence of labor demand response. Both of them were analyzed using error correction model (ECM). The result of the study indicated that, in the spatial, the rural real wage is more rigid than urban, while, in the sectoral base, the real wage rigidity mainly in industrial manufacturing sector. The rural wage rigidity was in line with the imperfect information and the tendency using family labor, cause of market mechanism not exist. While, wage rigidity in the industrial sector was associated with the wage efficiency, the regional minimum wage rate (UMR) and the institutional of union labor had been stronger in the recent years. Furthermore, the labor demand response toward shock of real wage was more indolent in urban area than similar response in rural area. The characteristic of labor recruitment system was generally formal in urban area and therefore the response required longer time to be in place.

Key words: Demand response, indolence, labor market, Sulawesi and wage rigidity

PENDAHULUAN

Salah satu masalah serius yang dihadapi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah tingginya angka pengangguran. Bahkan, pada tahun 2003 dan 2004 daerah ini tercatat memiliki tingkat pengangguran paling tinggi di Indonesia yakni masing-masing mencapai 16,97% dan 15,93% (Sakernas, 2003-2004). Pengangguran di daerah ini dipengaruhi banyak faktor dan bersifat multidimensional. Dari aspek ketenaga kerjaan, Pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 2,50% per tahun tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang tumbuh sekitar 3,78% per tahun selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Dari aspek ekonomi, Pertumbuhan ekonomi, masih di dorong oleh komponen konsumsi yang pada

tahun 2003 memiliki kontribusi sekitar 57,01%, sehingga tidak dapat mengurangi tekanan pasar tenaga kerja-- pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi tekanan pasar tenaga kerja haruslah berbasiskan pada investasi yang mengarah kepada perluasan kapasitas usaha dan produksi. Selain itu sektor industri yang memiliki pertumbuhan tinggi, tapi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyerap tenaga kerja.

Mankiw (2003) menyebutkan bahwa penyebab lain pengangguran adalah karena kekakuan upah (*wage rigidity*) yakni gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Upah tidak selalu fleksibel menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika upah riil di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan

permintaan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta sehingga terjadi pengangguran. Hal senada juga diungkapkan Taylor dan Chenery ketika mengkritik teori pertumbuhan Solow, bahwa ketidak sempurnaan pasar tenaga kerja terjadi secara kritis di negara berkembang yang ditunjukkan bahwa tenaga kerja menerima upahnya lebih besar dari upah pasar bebasnya (Kasliwal, 1995), atau dengan kata lain $PM_L < w/p$ (upah riil lebih tinggi dari produksi marginal tenaga kerja). Menurutnya kegagalan pasar ini berkaitan dengan: (1) Harga (upah) tidak melakukan penyesuaian secara bebas, dan (2) agen ekonomi merespon secara lambat terhadap perubahan harga (upah) yang terjadi. Dengan demikian pandangan ini sudah sejalan dengan pendapat Mankiw tentang gagalnya upah melakukan penyesuaian ke arah keseimbangan pasar ketika terjadi *shock* (perubahan) pada sisi permintaan maupun pada sisi penawaran tenaga kerja. Indikator kekakuan upah dan kelambanan respon permintaan tenaga kerja dapat terukur dari lamanya waktu yang dibutuhkan oleh upah dan permintaan tenaga kerja ketika terjadi perubahan dari faktor determinannya.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji tingkat kekakuan upah sektoral dan kelambanan respon permintaan tenaga kerja sektoral di Sulawesi Selatan, sebagai indikator distorsi pasar tenaga kerja.

Tujuan dan Manfaat

Studi ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis perilaku dinamis upah riil dan kesempatan kerja sektoral di Sulawesi Selatan; (2) Menganalisis Tingkat kekakuan upah riil dan kelambanan respon kesempatan kerja sektoral di Sulawesi Selatan; (3) Mengidentifikasi faktor-faktor penentu kekakuan upah riil sektoral di Sulawesi Selatan

Studi ini diharapkan dapat memberi arak kebijakan pemerintah dalam melakukan intervensi dalam pasar tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan data upah riil rata-rata bulanan yang dideflasi dengan IHK tahun 2000 serta data Kesempatan kerja dan angkatan kerja tahunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang di peroleh dari data Sakernas dari tahun 1985-2004. Untuk menguji lamanya waktu yang dibutuhkan tingkat upah untuk melakukan penyesuaian akibat adanya goncangan dari sisi permintaan atau penawaran tenaga kerja, demikian pula lamanya waktu yang dibutuhkan agen ekonomi untuk merespon *shock* upah riil, maka metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode *Error Correction Model (ECM)*. Secara garis besar bentuk persamaan ECM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\Delta W_{jt} = b_1 \Delta K_{jt} + \gamma (W_{jt-1} - \beta_0 - \beta_1 K_{jt-1}) + \varepsilon_t \dots\dots\dots (1)$$

$$\Delta K_{jt} = b_1 \Delta W_{jt} + \gamma (K_{jt-1} - \beta_0 - \beta_1 W_{jt-1}) + \varepsilon_t \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- W : Upah Riil sektoral di Perkotaan dan pedesaan (Rp/bulan): dideflasi dengan IHK (2000=100)
- K : Kesempatan Kerja sektoral di Perkotaan dan pedesaan (orang)
- b₁ : Paramter jangka pendek
- γ : Parameter Error Correction

- β_0, β_1 : Parameter jangka panjang
 j : Wilayah Perkotaan dan wilayah pedesaan
 i : Sektor pertanian, sektor industri dan sektor lainnya

Parameter *Error Correction* (γ) dalam persamaan diatas diinterpretasikan sebagai *speed of adjustment* dari variabel endogen akibat adanya *shock* dari variabel tertentu (Verbeek, 2000). Langkah-langkah *diagnostik test* ECM yang dilakukan dalam studi ini adalah

1. **Uji unit root** : tahap ini dimaksudkan untuk memastikan ada tidaknya persoalan akar unit (*unit root*) pada masing-masing variabel yang akan dimasukkan dalam persamaan ECM. Apabila pada suatu variabel terdeteksi mengandung akar unit, maka variabel tersebut bersifat tidak stasioner (*non-stationare*). Data yang tidak stasioner akan menghasilkan persamaan yang tidak valid dan *spurious* (semu). Metode yang digunakan untuk mendeteksi persoalan akar unit ini adalah uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF Test). Apabila data "level" menghasilkan nilai *t*-statistik yang tidak signifikan pada nilai kritis 5 persen, atau dengan kata lain apabila nilai *t*-statistik lebih kecil dari nilai statistik *Augmented Dickey-Fuller* mencakup *intercep*, tetapi tanpa *trend* dengan nilai kritis 5% = -3.0400, maka data "level" tersebut terdeteksi mengandung persoalan akar unit.
2. **Uji Derajat Integrasi atau Ordo Optimal** : tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui derajat integrasi ke berapa sehingga data runtun waktu dari masing-masing variabel yang akan digunakan bersifat stasioner. Suatu data defrensial yang di uji dikatakan bersifat stasioner apabila nilai *statistik-t* (Nilai ADF-statistik) signifikan pada tingkat nilai kritis 5%. Jika nilai *statistik-t* data deraja pertama (*first-difference*) suatu variabel signifikan pada nilai kritis 5%, maka variabel tersebut memiliki ordo optimal pada deraja pertama (*first-difference*), dan jika signifikan pada data deraja kedua maka dikatakan optimal terintegrasi pada data *second-difference*. Variabel dalam persamaan ECM diolah berdasarkan tingkat derajat integrasinya masing-masing.
3. **Uji Kointegrasi** : tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dua variabel yang akan diamati dapat berkointegrasi, apabila kedua variabel tersebut tidak berkointegrasi maka berarti tidak memiliki kestabilan atau keseimbangan jangka panjang. Untuk melakukan uji kointegrasi ini, maka langkah awal yang dilakukan adalah membangun persamaan regresi terhadap dua variabel yang akan diamati dengan menggunakan data pada derajat yang sama. Selanjutnya nilai residual dari persamaan tersebut ditaksir persamaan *autoregresive*-nya untuk mengetahui apakah residual tersebut bersifat stasioner atau non-stasioner. Dikatakan stasioner apabila nilai *statistik-t* dari residual signifikan pada nilai kritis 5%. Jika residual ini bersifat stasioner, berarti terindikasi dapat terjadi kointegrasi.
4. **Pendugaan Koefisien ECM** : untuk menduga koefisien ECM, maka variabel-variabel dalam persamaan di olah sesuai dengan derajat integrasinya serta memasukkan residual yang bersifat stasioner sebagai salah satu variabel dalam persamaan. Setelah persamaan tersebut terbentuk, selanjutnya diregresikan dengan menggunakan metode OLS. Nilai parameter dari

residual tersebut merupakan koefisien ECM yang dapat diinterpretasikan sebagai *speed of adjustment* dari variabel endogennya.

5. **Impuls Respon Function (IRF)** : Tahap ini, merupakan analisa lanjutan dari persamaan ECM. Analisa ini bertujuan untuk melihat bagaimana perilaku respon dinamik variabel endogen akibat adanya *shock* dari variabel determinannya. Output dari analisa ini disajikan dalam bentuk grafik.

Persamaan ECM yang dibangun dalam penelitian ini, dikelompokkan menjadi dua bagian yakni (1) respon upah riil terhadap perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Model ini dimaksudkan untuk mengukur kekakuan upah riil (*wage rigidity*) sektoral baik di perkotaan maupun di pedesaan. (2) respon permintaan tenaga kerja terhadap perubahan upah riil. Model ini dimaksudkan untuk menggambarkan kelambanan respon agen ekonomi dalam pasar tenaga kerja untuk merespon perubahan upah riil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Diagnostik Persamaan *Error Correction Model* (ECM)

Hasil pendeteksian uji unit root dengan metode *Augmented Dickey-Fuller* (ADF Test) pada masing-masing variabel yang akan dimasukkan dalam persamaan ECM, menghasilkan nilai *t*-statistik yang tidak signifikan pada nilai kritis 5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel pada tingkat data "level" terdeteksi mengandung unit root atau bersifat non-stasioner. Karenanya data "level" masing-masing variabel tidak digunakan dalam persamaan ECM, tetapi menggunakan data "defrensial" sesuai ordo optimalnya. Hasil pengujian derajat integrasi (ordo optimal) dengan metode

uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF Test), menunjukkan bahwa umumnya variabel yang dianalisis memiliki ordo optimal pada deraja kedua (*second-difference*), kecuali variabel upah riil industri perkotaan ordo optimalnya pada deraja pertama (*first-difference*). Karena itu variabel-variabel dalam persamaan ECM yang dibangun dalam studi ini menggunakan data "*second-difference*", kecuali variabel upah riil industri perkotaan menggunakan data "*first-difference*". Selanjutnya hasil uji kointegrasi masing-masing persamaan ECM dengan menaksir persamaan *autoregressive*-nya menunjukkan bahwa nilai residual dari masing-masing persamaan bersifat stasioner, yang berarti semua persamaan yang diamati dalam penelitian ini terjadi kointegrasi. Gambaran ini menunjukkan bahwa pendugaan koefisien ECM dalam studi ini telah memenuhi syarat tahap-tahap uji diagnostik

B. Tingkat Kekakuan Upah Riil (*Real Wage Rigidity*)

Model persamaan ECM yang dibangun pada bagian ini, ditujukan untuk mengukur periode waktu yang dibutuhkan oleh upah riil dalam merespon guncangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Periode penyesuaian tersebut, sekaligus merupakan indikator kekakuan upah (*wage rigidity*). Semakin panjang periode penyesuaian, maka semakin kaku upah riil dan sekaligus mengindikasikan terjadinya distorsi pasar tenaga kerja.

Hasil pendugaan koefisien ECM pada persamaan-persamaan respon upah riil, baik upah riil rata-rata di wilayah perkotaan maupun upah riil rata-rata di wilayah pedesaan, menunjukkan bahwa upah riil di wilayah perkotaan dan pedesaan serta upah riil rata-rata Sulawesi Selatan, tidak hanya di pengaruhi oleh

permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh *error term* (residual) atau variabel ECM pada tingkat $\alpha = 0.01$ dan 0.05 . Koefisien korelasi dari variabel ECM pada setiap persamaan yang bertanda negatif menandakan bahwa nilai upah riil pada saat sekarang (periode awal) berada diatas nilai jangka panjangnya. Upah riil yang tertahan diatas tingkat keseimbangannya, menunjukkan bahwa perusahaan gagal menurunkan upah riil (upah kaku) akibat kelebihan penawaran tenaga kerja. Dengan demikian upah riil di Sulawesi Selatan secara rata-rata, di

perkotaan maupun di pedesaan bersifat kaku (*rigid*).

Periode waktu yang dibutuhkan oleh upah riil rata-rata di Sulawesi Selatan untuk melakukan penyesuaian sehingga kembali ke posisi keseimbangannya adalah sekitar 9.5 bulan apabila *shock*-nya berasal dari permintaan tenaga kerja, sedangkan jika *shock*-nya berasal dari penawaran tenaga kerja, maka upah riil membutuhkan periode sekitar setengah tahun (6 bulan) untuk melakukan penyesuaian hingga kembali ke posisi keseimbangannya.

Tabel 1. Hasil estimasi parameter ECM persamaan respon upah riil rata-rata, upah riil perkotaan dan pedesaan terhadap guncangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di Sulawesi Selatan

PEUBAH		Parameter Dugaan	Probability t-Statistik	Periode Penyesuaian	
				Satuan Thn	Satuan Bln
D(WK)	Rata-rata Upah Riil Perkotaan				
	Intersept	610.86	0.8495		
	K.K Perkotaan D(KK)	0.1673	0.0018		
	ECM03WKKK (-1)	-1.9427	0.0000	0.51	6.18
	$R^2 = 0,819973$; F-Hitung = 34,16052 a); DW = 1,843076				
D(WK)	Rata-rata Upah Riil Perkotaan				
	Intersept	-1213.47	0.7573		
	A.Kerja Perkotaan D(AKK)	0.1069	0.0746		
	ECM04WKAKK (-1)	-2.2990	0.0000	0.44	5.22
	$R^2 = 0,832651$; F-Hitung = 37,31643 a); DW = 1,47553				
D(WD)	Rata-rata Upah Riil Pedesaan				
	Intersept	-1240.85	0.7692		
	K.K Pedesaan D(KD)	0.0705	0.0174		
	ECM05WDKD (-1)	-1.2025	0.0036	0.83	9.98
	$R^2 = 0,500981$; F-Hitung = 7,529481 a); DW = 2,032601				
D(WD)	Rata-rata Upah Riil Pedesaan				
	Intersept	-6579.89	0.1549		
	A.Kerja Pedesaan D(AKD)	0.1115	0.0197		
	ECM06WDAKD (-1)	-1.6480	0.0004	0.61	7.28
	$R^2 = 0,578953$; F-Hitung = 10,31272 a); DW = 1,674451				

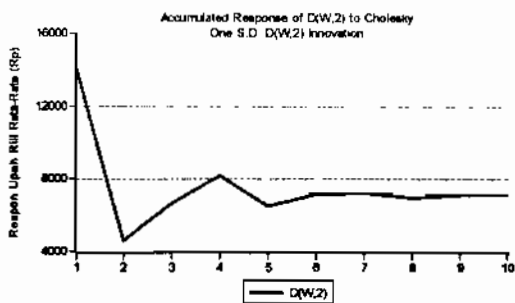
Sumber : Diolah dari Berbagai Data BPS, 1985-2004

Jika membandingkan periode penyesuaian upah riil di perkotaan dan pedesaan, tampaknya, periode waktu yang dibutuhkan oleh upah riil rata-rata di wilayah perkotaan lebih cepat dibandingkan upah riil di pedesaan.

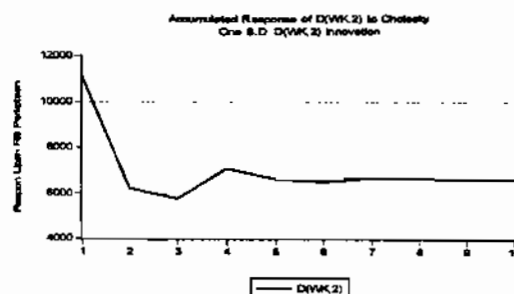
Dengan kata lain upah riil di pedesaan lebih kaku dibandingkan di perkotaan. Upah di perkotaan memerlukan waktu sekitar setengah tahun untuk melakukan penyesuaian ke posisi keseimbangannya, sementara di pedesaan memerlukan

waktu 7 hingga 10 bulan untuk kembali ke posisi keseimbangannya akibat guncangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pedesaan. Tingginya kekakuan upah di wilayah pedesaan, diduga terkait dengan sistem informasi yang tidak sempurna, serta tenaga kerja sektor usaha yang umumnya merupakan tenaga kerja keluarga, sehingga banyak alokasi tenaga kerja di wilayah ini, tidak melalui mekanisme pasar tenaga kerja.

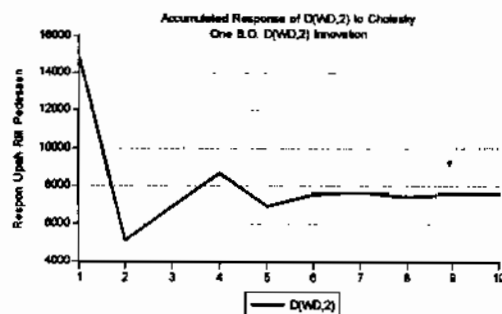
Selanjutnya bagaimana respon dinamis rata-rata upah riil di Sulawesi Selatan serta respon dinamis upah riil perkotaan dan pedesaan dari guncangan permintaan tenaga kerja, disajikan dalam Gambar 1 sampai Gambar 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa, pada periode awal upah riil pada setiap persamaan berada diatas posisi keseimbangannya, dan mengalami fluktuasi beberapa periode kedepan hingga mencapai keseimbangan jangka panjangnya. Dalam jangka pendek upah riil memerlukan waktu kuran dari setahun untuk mencapai posisi keseimbangan, baik upah riil rata-rata, maupun upah riil perkotaan dan pedesaan. Akan tetapi dalam jangka panjang upah riil masih akan berfluktuasi hingga sekitar lima tahun kedepan untuk berada pada posisi keseimbangan jangka panjangnya.



Gambar 1. Respon dinamis rata-rata upah riil Sulawesi Selatan terhadap guncangan permintaan tenaga kerja total



Gambar 2. Respon dinamis upah riil perkotaan terhadap guncangan permintaan tenaga kerja perkotaan



Gambar 3. Respon dinamis upah riil pedesaan terhadap guncangan permintaan tenaga kerja pedesaan

Selanjutnya, hasil estimasi persamaan ECM upah riil sektoral di wilayah perkotaan dan pedesaan, menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja di sektor industri baik industri perkotaan maupun industri pedesaan tidak berpengaruh signifikan terhadap upah riil sektoralnya. Sedangkan variabel serupa di sektoral pertanian dan sektora lainnya berpengaruh signifikan hingga tarap kesalahan $\alpha = 0.05$ dan 0.15 . Akan tetapi variabel *error term* (ECM) pada setiap persamaan upah riil sektoral ini berpengaruh signifikan pada tarap nyata $\alpha = 0.01$ dan 0.05 . Koefisien korelasi dari variabel ECM juga bertanda negatif untuk semua persamaan, yang berarti bahwa upah riil sektoral saat sekarang berada di atas posisi keseimbangannya atau upah bersifat kakauh.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa sektor industri, baik di perkotaan, terlebih lagi industri pedesaan memiliki upah yang paling kaku. Periode waktu yang dibutuhkan oleh upah riil di sektor industri baik di perkotaan maupun dipedesaan sehingga kembali ke posisi keseimbangannya adalah sekitar 1.2 tahun. Sedangkan periode penyesuaian upah riil di sektor pertanian dan sektor lainnya baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan adalah kurang dari satu tahun. Tingginya kekakuan upah di sektor industri ini,

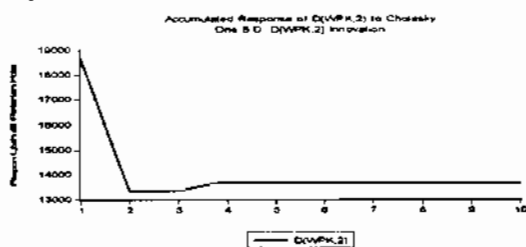
diduga terutama terkait dengan efisiensi upah, dimana pengusaha tidak serta merta menurunkan upah riilnya ketika upah riil berada di atas keseimbangan, karena dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya produktivitas tenaga kerjanya. Selain itu, pelaku bisnis di sektor ini umumnya mematuhi UMR, terutama bisnis formal. Hal lain adalah menguatnya kelembagaan serikat pekerja, khususnya tenaga kerja sektor industri perkotaan beberapa tahun terakhir.

Tabel 2 Hasil estimasi parameter ECM persamaan respon upah riil sektoral di wilayah perkotaan dan pedesaan terhadap guncangan permintaan tenaga kerja sektoral di Sulawesi Selatan

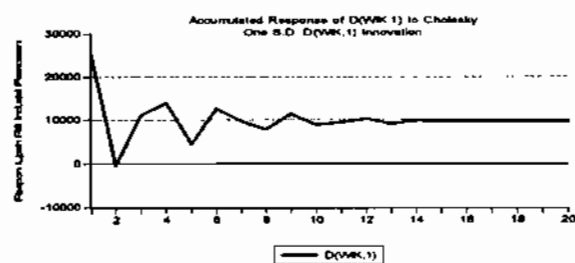
PEUBAH	Parameter Dugaan	Probability t-Statistik	Periode Penyesuaian	
			Satuan Thn	Satuan Bln
D(WPK) Upah Riil Pertanian Perkotaan				
Intersept	212.40	0.9623		
K.K Pertanian Kota D(KPK)	0.3965	0.1290		
ECM07WPKKPK (-1)	-1.2671	0.0001	0.79	9.47
R² = 0,670355; F-Hitung = 15,25176 a); DW = 2,116995				
D(WIK) Upah Riil Industri Perkotaan				
Intersept	4568.39	0.4806		
K.K Industri Kota D(KIK)	0.4959	0.4199		
ECM08WIKKIK (-1)	-0.9222	0.0077	1.08	13.01
R² = 0,387559; F-Hitung = 4,746087 b); DW = 1,878977				
D(WLK) Upah Riil S.Lain Perkotaan				
Intersept	2341.68	0.5719		
K.K S.Lain Kota D(KLK)	0.1531	0.0140		
ECM09WLKCLK (-1)	-2.2294	0.0000	0.45	5.38
R² = 0,595004; F-Hitung = 11,01871 a); DW = 1,873971				
D(WPD) Upah Riil Pertanian Pedesaan				
Intersept	-4632.17	0.3519		
K.K Pertanian Desa D(KPD)	0.0996	0.0294		
ECM10WPKKPD (-1)	-1.5597	0.0013	0.64	7.69
R² = 0,548907; F-Hitung = 9,126272 a); DW = 2,200678				
D(WID) Upah Riil Industri Pedesaan				
Intersept	-732.28	0.9105		
K.K Industri Desa D(KID)	0.0988	0.9153		
ECM11WIDKID (-1)	-0.8382	0.0217	1.19	14.32
R² = 0,352813; F-Hitung = 4,088608 b); DW = 2,349674				
D(WLD) Upah Riil S.Lain Pedesaan				
Intersept	-2979.92	0.7407		
K.K S.Lain Desa D(KLD)	0.2240	0.0124		
ECM12WLDKLD (-1)	-1.4354	0.0092	0.70	8.36
R² = 0,509951; F-Hitung = 7,804590 a); DW = 2,022569				

Sumber : Diolah dari berbagai data BPS, 1985-2004

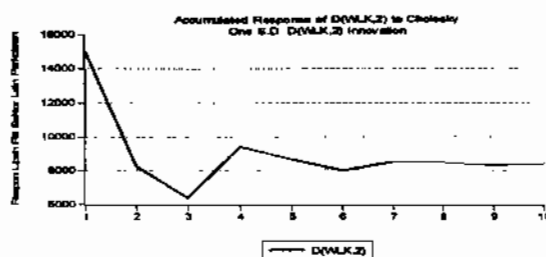
Bagaimana perilaku respon dinamis dari masing-masing upah riil sektoral, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan, terlihat pada Gambar 4 sampai Gambar 9. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua upah riil sektoral berada diatas upah keseimbangannya, sehingga upah riil sektoral ini akan terkoreksi untuk mencapai keseimbangannya jika ada guncangan permintaan tenaga kerja sektoral. Dalam jangka pendek, secara umum upah riil sektoral memerlukan waktu kurang dari satu tahun untuk mencapai posisi keseimbangannya, kecuali di sektor industri memerlukan waktu lebih satu tahun. Dalam jangka panjang, dampak guncangan permintaan tenaga kerja ini akan menimbulkan fluktuasi upah yang cukup lama di sektor industri, khususnya industri perkotaan yang dampaknya masih terasa hingga 10 tahun ke depan, sedangkan di sektor pertanian, fluktuasi upah dalam jangka panjang tidak berlangsung lama.



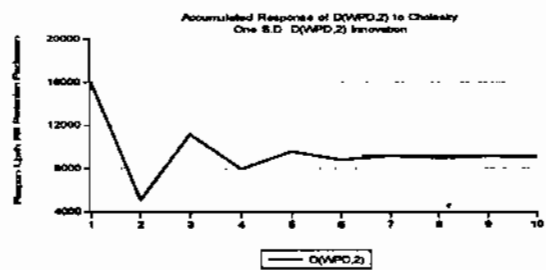
Gambar 4. Respon dinamis upah riil sektor pertanian perkotaan terhadap guncangan permintaan tenaga kerja pertanian perkotaan



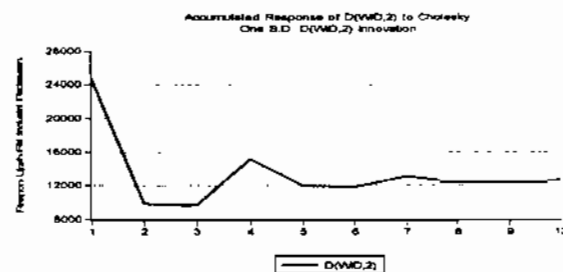
Gambar 5. Respon dinamis upah riil sektor industri perkotaan terhadap guncangan permintaan tenaga kerja industri perkotaan



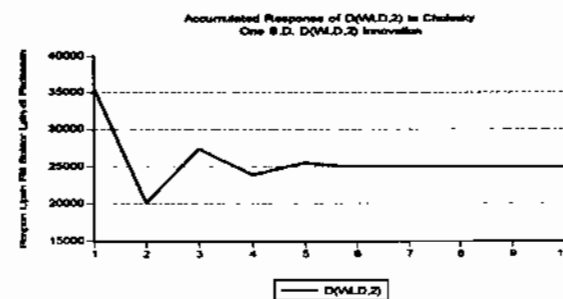
Gambar 6. Respon dinamis upah riil sektor lain perkotaan terhadap guncangan permintaan tenaga kerja sektor lain perkotaan



Gambar 7. Respon dinamis upah riil sektor pertanian pedesaan terhadap guncangan permintaan tenaga kerja pertanian pedesaan



Gambar 8. Respon dinamis upah riil sektor industri pedesaan terhadap guncangan permintaan tenaga kerja industri pedesaan



Gambar 9. Respon dinamis upah riil sektor lain pedesaan terhadap guncangan permintaan tenaga kerja sektor lain pedesaan

C. Tingkat Kelambanan Respon Permintaan Tenaga Kerja (*Indolence of labor demand response*)

Bagian ini ditujukan untuk mengukur kelambanan respon pengusaha dalam pasar tenaga kerja, dimana kelambanan respon tersebut dicerminkan dari kelambanan respon permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) ketika terjadi *shock* upah riil. Kelambanan respon permintaan tenaga kerja ini, juga diukur dengan metode persamaan ECM.

Hasil pendugaan parameter ECM untuk persamaan respon permintaan tenaga kerja dari guncangan upah riil, menunjukkan bahwa upah riil rata-rata, maupun upah riil perkotaan dan pedesaan dapat direspon secara signifikan oleh permintaan tenaga kerja pada tingkat kesalahan $\alpha = 0.01$ dan

0.05. Demikian pula *error term* (residual) pada setiap persamaan berpengaruh signifikan hingga tarap nyata 95 persen.

Selanjutnya di lihat dari koefisien korelasi dari variabel ECM (residual) pada setiap persamaan bersifat negatif. Gambaran ini menunjukkan bahwa pada periode awal permintaan tenaga kerja berada diatas keseimbangan jangka panjangnya, sehingga permintaan tenaga kerja ini akan merespon harga untuk mencapai posisi keseimbangannya kembali. Dibandingkan dengan respon upah riil terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja, seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka tampaknya respon kesempatan kerja (permintaan tenaga kerja) dari perubahan upah riil, bersifat lebih kaku atau lebih lamban (Tabel 3).

Tabel 3 Hasil estimasi parameter ECM persamaan respon kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan terhadap guncangan upah riil di Sulawesi Selatan

PEUBAH		Parameter Dugaan	Probability <i>t</i> -Statistik	Periode Penyesuaian	
				Satuan Thn	Satuan Bln
D(KK)	K.Kerja Perkotaan				
	Intersept	5438.97	0.6954		
	Rata-2 Upah Riil Kota D(WK)	2.4262	0.0028		
	ECM14KKWK (-1)	-0.4991	0.0403	2.00	24.04
$R^2 = 0,319067$; F-Hitung = 3,514296 c); DW = 1,538104					
D(KD)	K.Kerja Pedesaan				
	Intersept	9857.13	0.7732		
	Rata-2 Upah Riil Desa D(WD)	3.3388	0.0452		
	ECM15KDWD (-1)	-0.6867	0.0239	1.46	17.48
$R^2 = 0,461628$; F-Hitung = 6,430896 a); DW = 2,012186					

Sumber : Diolah dari berbagai data BPS, 1985-2004

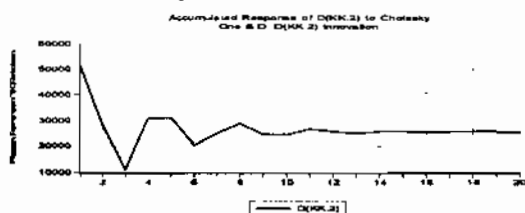
Dengan membandingkan respon permintaan tenaga kerja perkotaan dengan respon permintaan tenaga kerja pedesaan dari guncangan upah riil masing-masing, maka tampaknya kesempatan kerja di pedesaan akan merespon lebih cepat dibandingkan kesempatan kerja di perkotaan. Periode waktu yang dibutuhkan oleh kesempatan kerja perkotaan untuk mencapai keseimbangannya adalah sekitar dua tahun, sementara di pedesaan hanya membutuhkan sekitar 1.5 tahun.

Lambannya respon kesempatan kerja di perkotaan dibandingkan dengan respon

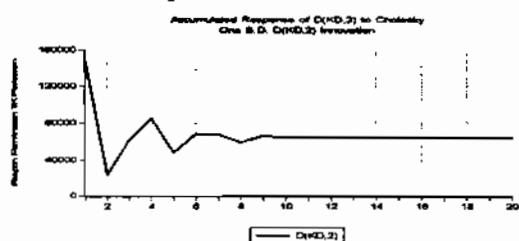
kesempatan kerja di pedesaan, di duga terkait dengan sistem *recruitment* tenaga kerja serta spesifikasi tenaga kerja di butuhkan sektor-sektor usaha di perkotaan berbeda dengan di pedesaan. Sektor usaha di perkotaan umumnya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, spesifikasi pendidikan tertentu dan persyaratan lainnya serta dengan sistem perekrutan yang umumnya menggunakan prosedur formal, demikian pula dalam hal pemutusan hubungan kerja perusahaan diharuskan memenuhi aturan-aturan tertentu, sehingga respon kesempatan kerja perkotaan ini

memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mencapai posisi keseimbangannya kembali jika terjadi *shock* upah riil. Kelambanan respon permintaan tenaga kerja, khususnya di sektor formal perkotaan juga terkait dengan besarnya komponen non-upah dalam struktur pendapatan pekerja (seperti jaminan sosial). Sementara kegiatan produktif di pedesaan yang kebutuhan tenaga kerjanya tidak terlalu spesifik dan sistem perekrutan tenaga kerjanya pun lebih sederhana sehingga memerlukan waktu yang lebih pendek untuk mencapai posisi keseimbangannya kembali. Respon kesempatan kerja pedesaan yang lebih cepat ini, juga sekaligus menunjukkan bahwa kesempatan kerja pedesaan lebih fleksibel dalam menyerap para “pencari kerja sementara” jika terjadi penurunan upah.

Hasil analisis *Impuls Respon Function (IRF)* terhadap persamaan respon kesempatan kerja total serta kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan dari guncangan upah riil, memperlihatkan perilaku respon kesempatan kerja, baik dalam jangka pendek, maupun perilaku beberapa periode kedepan dalam mencapai keseimbangan jangka panjangnya, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 10 sampai Gambar 11.



Gambar 10. Respon dinamis kesempatan kerja perkotaan terhadap guncangan upah riil perkotaan.



Gambar 11. Respon dinamis kesempatan kerja pedesaan terhadap guncangan upah riil pedesaan

Gambar diatas menunjukkan bahwa, dalam jangka pendek kesempatan kerja perkotaan memerlukan waktu sekitar 2 tahun untuk mencapai posisi keseimbangannya, sedangkan kesempatan kerja pedesaan memerlukan waktu kurang dari dua tahun. Selain itu dalam jangka panjang guncangan upah riil di perkotaan akan berdampak pada fluktuasi kesempatan kerja yang cukup lama yakni sekitar sembilan tahun, sementara di pedesaan fluktuasi kesempatan kerja mulai stabil pada tahun ke enam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Periode waktu yang dibutuhkan oleh upah riil rata-rata di wilayah perkotaan lebih cepat dibandingkan upah riil di pedesaan. Dengan kata lain upah riil di pedesaan lebih kaku dibandingkan di perkotaan. Upah di perkotaan memerlukan waktu sekitar setengah tahun untuk melakukan penyesuaian ke posisi keseimbangannya, sementara di pedesaan memerlukan waktu 7 hingga 10 bulan untuk kembali ke posisi keseimbangannya akibat guncangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pedesaan.
2. Secara sektoral, upah riil di sektor industri baik di perkotaan maupun dipedesaan memerlukan waktu penyesuaian paling lama yakni sekitar 1.2 tahun. Sedangkan periode penyesuaian upah riil di sektor pertanian dan sektor lainnya kurang dari satu tahun.
3. Penyebab tingginya kekakuan upah di pedesaan, terkait dengan sistem informasi yang tidak sempurna, serta adanya kecenderungan penggunaan tenaga kerja keluarga menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan. Sedangkan penyebab kekakuan upah pada sektor industri terutama disebabkan faktor “*efisiensi upah*”, dimana pengusaha tidak serta merta menurunkan upah riilnya ketika

upah riil berada di atas keseimbangan, karena dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya produktivitas tenaga kerjanya. Selain itu, pelaku bisnis di sektor ini umumnya mematuhi UMR, terutama bisnis formal. Hal lain adalah menguatnya kelembagaan serikat pekerja, khususnya tenaga kerja sektor industri perkotaan beberapa tahun terakhir.

4. Respon permintaan tenaga dari guncangan upah riil lebih lambat di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Periode waktu yang dibutuhkan oleh kesempatan kerja perkotaan untuk mencapai keseimbangannya adalah sekitar dua tahun, sementara di pedesaan hanya membutuhkan sekitar 1.5 tahun. Lambatnya respon kesempatan kerja di perkotaan terkait dengan sistem *recruitment* tenaga kerja serta spesifikasi tenaga kerja yang di butuhkan sektor-sektor usaha di perkotaan berbeda dengan di pedesaan. Sektor usaha di perkotaan umumnya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, spesifikasi pendidikan tertentu dan persyaratan lainnya serta dengan sistem perekrutan yang umumnya menggunakan prosedur formal, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, besarnya komponen non-upah dalam struktur pendapatan pekerja, seperti jaminan sosial, khususnya di sektor formal perkotaan menyebabkan permintaan tenaga kerja lambat merespon upah riil.

Saran

1. Intervensi pemerintah dalam pasar tenaga kerja hendaknya bermuarah pada terciptanya pasar tenaga kerja yang fleksibel. Salah satu cara untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja ini adalah pengurangan komponen non-upah dalam pendapatan karyawan. Cara ini mungkin kurang berpihak pada pekerja, tetapi dengan fleksibelnya pasar tenaga kerja akan menguntungkan para pencari kerja dan perusahaan. Cara ini

dapat dilakukan pemerintah melalui regulasi ketenaga kerjaan

2. Intervensi pemerintah yang mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja dapat pula dilakukan dengan cara memperbanyak dan memperluas posko-posko informasi ketenaga kerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2003-2004, *Survey Angkatan Kerja Nasional*, Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta.
- Kasliwal, P., 1995, *Development Economics*, South-Western Publishing, Cincinnati-Ohio, United States of America.
- Mankiw, N.G., 2003, *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kelima, Alih Bahasa : Imam Nurmawan, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Verbeek, M., 2000, *A Guide to Modern Econometrics*, John Wiley and Sons Ltd, England.